

# STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**



# STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021



# **Statistik Pendidikan Kabupaten Soppeng Tahun 2021**

Nomor Publikasi: 73120.2223

Katalog BPS: 4301002.7312

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xiv + 62 halaman

## **Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

## **Gambar Kulit:**

Canva

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

## **Diterbitkan oleh:**

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

## **Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

**Pembina:**

Muhlis, SE, M.Si

**Pengarah:**

Anny Arjumiati Anis, SE, MM

**Penulis:**

S. A. Herdiana Putri, S. Stat

**Penyunting:**

Yogi Surya Pratama, SST

**Desain Cover:**

S. A. Herdiana Putri, S. Stat

**Desain Layout**

S. A. Herdiana Putri, S. Stat

<https://soppengkab.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Bidang pendidikan menjadi tujuan ke-4 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Publikasi ini menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Informasi dasar yang disajikan diantaranya angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), dan angka buta huruf.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Watansoppeng, September 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Soppeng



Muhlis, SE, M.Si  
NIP. 196612311989031013

<https://soppengkab.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xiii
Bab 1 Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Sumber Data.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab 2 Metodologi.....	11
2.1 Ruang Lingkup.....	11
2.2 Kerangka Sampel.....	12
2.3 Rancangan Sampel.....	12
2.4 Metode Pengumpulan Data.....	13
2.5 Pengolahan Data.....	13
Bab 3 Konsep dan Definisi.....	17
Bab 4 Partisipasi Sekolah.....	23
4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	23
4.1.1 Partisipasi Prasekolah.....	23
4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	24
4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	26
4.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	29
Bab 5 Capaian Pendidikan.....	35

5.1	Kemampuan Membaca dan Menulis .....	35
Bab 6	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	42
6.1	Jumlah Sekolah.....	42
6.2	Jumlah Guru .....	43
6.3	Jumlah Murid.....	45
Bab 7	Penutup .....	50
7.1	Kesimpulan.....	50
7.2	Saran .....	52
Tabel-Tabel	.....	54

<https://soppengkab.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	56
Tabel 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021.....	56
Tabel 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	57
Tabel 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	57
Tabel 5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	58
Tabel 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	58
Tabel 7 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	59
Tabel 8 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	60
Tabel 9 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	61

<https://soppengkab.bps.go.id>

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	24
Gambar 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021.....	25
Gambar 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	27
Gambar 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	30
Gambar 5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	37
Gambar 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021.....	38
Gambar 7 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	42
Gambar 8 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	44
Gambar 9 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021.....	45

<https://soppengkab.bps.go.id>

# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

<https://sopentext.bbps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya, dalam Ayat 2 ditekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang sehingga memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana, dan berlangsung kontinu (terus menerus sepanjang hayat) ke arah membina manusia/anak didik menjadi insan paripurna, dewasa, dan berbudaya (civilized). Terorganisir memiliki makna bahwa Pendidikan tersebut dilakukan oleh usaha sadar manusia dengan dasar dan tujuan yang jelas, ada tahapan dan ada komitmen bersama. Adapun berencana mengandung arti bahwa pendidikan itu direncanakan sebelumnya, dengan suatu perhitungan yang matang dan berbagai sistem pendukung yang disiapkan. Sementara berlangsung kontinu berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terus menerus sepanjang hayat, yaitu sepanjang manusia hidup di muka bumi.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menggariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersamasama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Melihat pentingnya pembangunan di bidang pendidikan, sejak awal kemerdekaannya Indonesia telah mencanangkan kebulatan tekad bahwa pembangunan dibidang pendidikan adalah suatu keharusan dan mesti diutamakan. Ikrar tersebut terpatri dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dalam suatu kalimat "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa".

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, yakni SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yakni SMA dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Selanjutnya, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung

pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pentingnya pendidikan yang berkualitas semakin disadari sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan masyarakat berhasil ditingkatkan (Mutofin, 1996:24). Tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia. Di samping sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah sekolah serta kuantitas dan kualitas guru, berbagai hal lain yang menunjang kegiatan pendidikan sangat diperlukan sebagai satu kesatuan yang saling menunjang dan saling mengkait.

Betapa sulit dan peliknya masalah yang dihadapi. Terkadang ketika satu masalah dapat diselesaikan, akan muncul lagi satu atau beberapa masalah lain. Ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi adalah salah satu faktor yang memengaruhi berbedanya tingkat pendidikan antarpenduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Selain itu, kultur sosial dan budaya yang berbeda antardaerah juga masih cukup kuat memberi warna terhadap kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun bagi penduduk perempuan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan sebagai acuan untuk perencanaan serta penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Soppeng, pemerintah perlu mengandalkan kualitas sumber daya manusia melalui inovasi dan kreasinya untuk mampu membawa Kabupaten Soppeng bersaing dalam tataran nasional maupun global.

Beberapa indikator pendidikan disajikan dalam publikasi *"Statistik Pendidikan Kabupaten Soppeng 2021"* sebagai gambaran dari situasi, kondisi, serta capaian pembangunan di bidang pendidikan. Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai pendidikan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Selain itu,

digunakan data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Soppeng akan dilihat secara khusus melalui beberapa indikator penting, yakni kemampuan baca tulis penduduk/angka melek huruf), tingkat partisipasi sekolah yang meliputi angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi kasar (APK), serta tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan siswa menurut jenjang pendidikan dan partisipasi sekolah anak usia prasekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur hasil pembangunan di bidang pendidikan, misalnya Program Wajib Belajar 12 Tahun dan penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

## 1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun untuk menyediakan data tentang keadaan kesejahteraan penduduk dilihat dari sektor pendidikan yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan status pendidikan yang sedang diikuti. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini antara lain:

1. Menyediakan data statistik berupa gambaran Pendidikan penduduk Kabupaten Soppeng.
2. Menyediakan data dasar pendidikan Kabupaten Soppeng untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil berbagai kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan; dan
3. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengevaluasi pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan.

## 1.3 Sumber Data

Data dan informasi pendidikan bersumber dari Susenas Kor Maret 2021. Susenas merupakan survei semseteran yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan yang relatif luas. Susenas dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia. Sampel Susenas Kabupaten Soppeng tersebar di 8

kecamatan yang mencakup 620 rumah tangga baik wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan. Selain itu, data sekunder mengenai pendidikan bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Soppeng 2021 disusun atas tujuh bab, dilengkapi tabel-tabel lampiran dengan sistematika;

- BAB I. PENDAHULUAN, meliputi Latar Belakang, Tujuan Penulisan, Sumber Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II. METODOLOGI, meliputi Ruang Lingkup, Kerangka Sampel, Rancangan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data.
- BAB III. KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini.
- BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH, meliputi Partisipasi Siswa pasc Pendidikan Prasekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
- BAB V. CAPAIAN PENDIDIKAN, meliputi Angka Melek Huruf, Angka Buta Huruf, Penduduk yang Tidak Bersekolah Lagi, dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.
- BAB VI. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, meliputi Jumlah Sekolah, Jumlah Pendidik, Jumlah Siswa, dan Rasio Murid/Siswa terhadap Sekolah dan Guru.
- BAB VII. PENUTUP, meliputi Kesimpulan.

<https://soppengkab.bps.go.id>

# **BAB 2**

# **METODOLOGI**

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB 2 METODOLOGI

Publikasi ini disusun berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021. Seperti halnya publikasi tahun sebelumnya, metodologi, konsep dan definisi Susenas tetap dicantumkan untuk memberikan arah dan panduan dalam pemanfaatan data yang disajikan.

## 2.1 Ruang Lingkup

Susenas Maret 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia dengan ukuran sampel sebesar 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus<sup>1</sup> khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi rumah tangga yang berada di dalam blok sensus biasa. Jumlah sampel Susenas Maret 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 620 rumah tangga, tersebar dalam 62 blok sensus di wilayah perkotaan dan perdesaan. Seluruh rumah tangga sampel tersebut dicacah dengan kuesioner VSEN20.K dan VSEN20.KP. Data yang dikumpulkan dalam Susenas meliputi keterangan umum anggota rumah tangga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja seorang petugas pencacah. Syarat blok sensus adalah harus memiliki batas-batas yang mudah dikenali, terletak dalam satu hamparan, serta setiap desa/kelurahan dibagi habis menjadi beberapa blok sensus.

## 2.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel induk atau sampling frame induk kegiatan Susenas, Sakernas, dan Supas 2015 adalah sekitar 288.000 blok sensus (40 persen populasi) yang ditarik secara probability proportional to size (PPS)<sup>2</sup> dengan ukuran jumlah rumah tangga SP2010 dari master frame blok sensus. Selanjutnya untuk kegiatan Susenas didefinisikan sebagai berikut:

1. Kerangka sampel tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
2. Kerangka sampel tahap kedua adalah daftar 40 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya. Sebanyak 40 persen blok sensus tersebut disebut sampling frame induk.
3. Kerangka sampel tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

## 2.3 Rancangan Sampel

Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 dilaksanakan setiap semester. Data yang dikumpulkan pada semester satu akan digunakan untuk memperkirakan (estimasi) sampai tingkat kabupaten/kota. Sampel rumah tangga untuk estimasi kabupaten/kota dipilih dengan metode *two stage one phase stratified sampling* dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Memilih 40 persen blok sensus populasi secara PPS dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.

Tahap 2: Memilih sejumlah  $n$  blok sensus sesuai alokasi secara *systematic*<sup>3</sup> di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.

---

<sup>2</sup> *Proportional Probability to Size (PPS)* adalah salah satu desain pengambilan sampel, dimana probabilita setiap unit sampel ditentukan oleh besarnya size unit sampel tersebut. Dalam hal ini unit sampelnya blok sensus dengan size banyaknya rumah tangga tiap blok sensus. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu blok sensus maka probabilita terpilihnya blok sensus tersebut sebagai sampel semakin besar

<sup>3</sup> *Linear Systematic Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan angka kelipatan tertentu setelah unit sampel diurutkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini unit sampelnya adalah rumah tangga (dalam satu blok sensus) yang diurutkan berdasarkan pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Dimaksudkan supaya yang sampel yang terpilih meliputi semua kelompok pendidikan terakhir.

Tahap 3: Memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan implicit stratification menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga (KRT).

## 2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Susenas dilaksanakan pada Maret 2021. Sampel total Susenas Maret 2021 di Kabupaten Soppeng sebanyak 620 rumah tangga. Pengumpulan data dari rumah tangga sampel terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden oleh petugas pencacah. Keterangan tentang rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan untuk individu diusahakan individu bersangkutan yang menjadi responden.

## 2.5 Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi tahap perekaman data, pemeriksaan konsistensi antarisian dalam kuesioner sampai dengan tahap tabulasi, sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Sebelum tahap ini dimulai, terlebih dahulu dilakukan cek awal atas kelengkapan isian daftar pertanyaan, penyuntingan terhadap isian yang tidak wajar, termasuk hubungan keterkaitan (konsistensi) antara satu jawaban dan jawaban lainnya. Proses perekaman data dilakukan di BPS kabupaten/kota.

<https://soppengkab.bps.go.id>

**BAB 3**  
**KONSEP**  
**DAN**  
**DEFINISI**

<https://solengkebps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## BAB 3 KONSEP DAN DEFINISI

Pembatasan kerangka berpikir dibuat untuk menghindari salah pengertian dalam membaca dan memahami data sehingga diperoleh kesamaan persepsi tentang angka yang disajikan. Beberapa konsep dan definisi yang perlu diperhatikan dalam publikasi ini, yaitu:

1. **Pendidikan prasekolah** adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur Pendidikan formal maupun melalui jalur pendidikan nonformal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan formal** adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Contoh satuan pendidikan prasekolah pada **jalur pendidikan nonformal** adalah PAUD terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

2. **Mengikuti Pendidikan prasekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan pendidikan prasekolah.
3. **Dapat membaca dan menulis** artinya jika seseorang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin/alfabet (a - z), huruf arab/hijaiyah, atau huruf lainnya (contoh: huruf jawa, kanji, dll). **Kalimat sederhana** adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai

dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat. Seorang tuna netra yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaillnya tidak digolongkan ke dalam kategori dapat membaca dan menulis.

4. **Bersekolah** adalah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal.
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
  - a. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD), termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Umum/Kejuruan (termasuk SMP Terbuka, SMEP, ST, SKKP), dan madrasah Tsanawiyah (MTs).
  - b. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain: SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh kementerian selain Kemendikbud), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  - c. **Jenjang pendidikan tinggi** merupakan jenjang Pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi:
    - Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang termasuk program Pendidikan akademik antara lain: program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Lulusan program-program tersebut berhak menggunakan gelar sarjana, magister, atau doktor.
    - Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian

terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program pendidikan vokasi antara lain: program diploma (diploma satu (D1), diploma 2 (D2), diploma tiga (D3), dan diploma empat (D4) atau sarjana terapan), magister terapan, dan doktor terapan. Lulusan program-program pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

- Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, akuntan, notaris, psikolog, guru/pendidik, dan wartawan. Sedangkan program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan antara lain: program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya dan utama, sesuai ketentuan yang berlaku. Lulusan program pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi atau spesialis.

6. **Jenjang pendidikan nonformal** yang dicakup dalam Susenas hanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26).
7. **Tidak/belum pernah bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan nonformal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
8. **Masih bersekolah** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan

formal maupun jenjang Pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

9. **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.
11. **Angka partisipasi sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tertentu.
12. **Angka partisipasi murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
13. **Angka partisipasi kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.

<https://www.opn.kab.go.id>

# **BAB 4**

# **PARTISIPASI**

# **SEKOLAH**

<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB 4 PARTISIPASI SEKOLAH

## 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan ke dalam APS.

Umur penduduk dalam penghitungan APS tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama umur 7-12 tahun untuk tingkat pendidikan SD, kelompok kedua umur 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP, dan kelompok ketiga umur 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Kajian tentang Angka Partisipasi Prasekolah/Sekolah digambarkan dalam ulasan berikut.

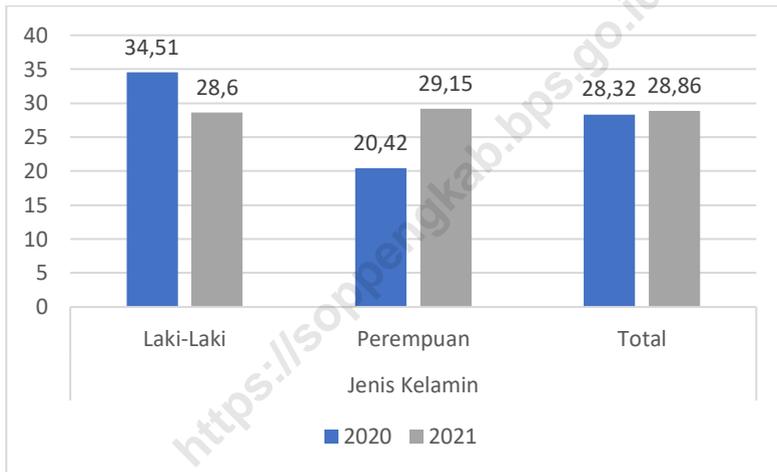
### 4.1.1 Partisipasi Prasekolah

Pendidikan prasekolah adalah jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), RA, BA, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak yang mempunyai program pengembangan anak. Bila syarat-syarat motorik ini telah dirangsang dengan berbagai jenis permainan, maka akan tumbuh dan berkembang menjadi jutaan sel motorik yang akan menjadi cikal bakal dari kecerdasan anak pada masa mendatang. Ketika anak memasuki pendidikan usia dini, yang harus dilatih tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana cara bermain yang benar, bernyanyi dan berkreasi sesuai dengan kekuatan fisik anak. (Hilary Clinton, 1998).

Hasil pengolahan data Susenas Maret tahun 2021 pada Gambar 1 menunjukkan bahwa angka partisipasi prasekolah untuk anak usia 0-6 tahun mencapai 28,86 persen, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan

tahun 2020 yang sebesar 28,32 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa partisipasi prasekolah untuk penduduk laki-laki usia 0-6 tahun menurun dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari 34,51 persen menjadi 28,6 persen, sementara pada penduduk perempuan usia 0-6 tahun mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 20,42 persen menjadi 29,15 persen.

Gambar 1 Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

#### 4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu, maka dilakukan penghitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan, SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Secara matematis APS dapat dihitung dengan formulasi berikut:

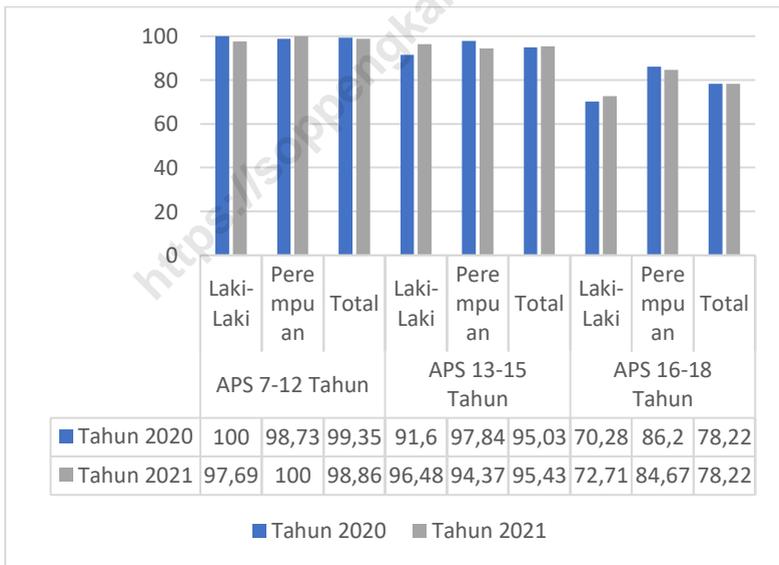
$$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{7-12}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$

$$APS_{13-15} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{13-15}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 100$$

$$APS_{16-18} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{16-18}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-18}} \times 100$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas Maret 2021 dan menggunakan formulasi di atas, hasilnya dapat disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

Pada Gambar 2 terlihat bahwa APS Usia 7-12 Tahun pada Tahun 2021 mencapai sebesar 98,86 persen. Artinya, hampir semua anak usia 7-12 tahun di Kabupaten Soppeng sedang mengikuti pendidikan Sekolah Dasar. Sementara pada

usia 13-15 tahun persentasenya baru mencapai 95,43 persen. Lain halnya pada usia 16-18 tahun, angka APS baru mencapai 78,22 persen. Secara umum pada jenjang pendidikan usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APS cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2020, sementara pada jenjang Pendidikan usia 16-18 tahun APS tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, pada jenjang usia 7-12 tahun tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara APS laki-laki dan APS perempuan baik di tahun 2020 maupun tahun 2021, yang mana hal tersebut menggambarkan bahwa kesetaraan gender dalam hal pendidikan sekolah dasar sudah tercapai. Namun pada jenjang usia 13-15 tahun, terdapat perbedaan APS yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan khususnya pada tahun 2020. Pada tahun 2020 diketahui bahwa APS perempuan mencapai 97,84 persen sedangkan APS laki-laki hanya sebesar 91,60 persen. Sama halnya dengan jenjang usia 16-18 tahun, baik pada tahun 2020 maupun 2021 terdapat perbedaan yang signifikan antara APS laki-laki dan APS perempuan. Pada tahun 2020 diketahui bahwa APS perempuan mencapai 86,20 persen, sedangkan APS laki-laki hanya 70,28 persen. Perbedaan semakin signifikan pada tahun 2021 dimana APS perempuan mencapai 84,67 persen, sedangkan APS laki-laki hanya 72,71 persen.

#### **4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Indikator APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Selain itu, APK juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Jika nilai APK menunjukkan angka mendekati atau lebih dari 100 persen berarti ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini menggambarkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya.

Tidak berbeda dengan APS dan APM, analisis APK juga perlu dilakukan pada 3 (tiga) jenjang/tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. APK pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

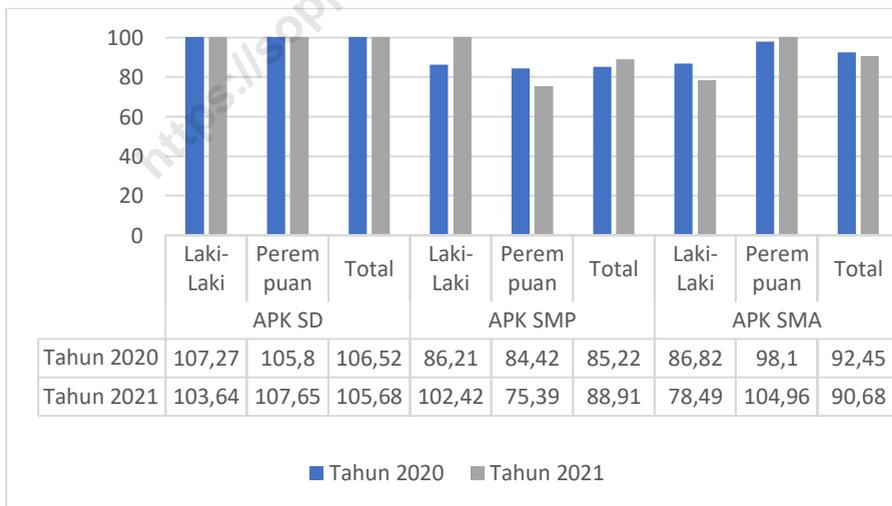
$$APK_{SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SD}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$

$$APK_{SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMP}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 100$$

$$APK_{SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMA}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-18}} \times 100$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas Maret 2021 dan menggunakan formulasi di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

Gambar 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

Dari Gambar 3, terlihat bahwa APK SD di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebesar 105,68 persen, yang berarti selain penduduk berumur 7 hingga 12 tahun

yang duduk di bangku SD/Sederajat, terdapat penduduk yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun yang duduk tingkat pendidikan yang sama. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada APK SD tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat bahwa APK SD mencapai 106,52 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2021 APK SD secara total mengalami penurunan.

Apabila dilihat pada jenjang Pendidikan SMP, dapat diketahui bahwa APK SMP mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa persentasenya mengalami kenaikan dari 85,22 persen di tahun 2020 menjadi 88,91 persen di tahun 2021. Baik 2020 maupun 2021, APK SMP menunjukkan persentase dibawah 100 persen, hal ini berarti bahwa penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Soppeng yang mengenyam Pendidikan SMP/Sederajat masih di bawah 100 persen, dengan kata lain terdapat penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Soppeng yang tidak dapat menempuh Pendidikan SMP/Sederajat.

Pada jenjang Pendidikan SMA, secara umum APK nya masih lebih baik dibandingkan dengan APK SMP walaupun persentasenya masih dibawah 100 persen. Dapat diketahui dari Gambar 3 bahwa APK SMA pada tahun 2021 mencapai 90,68 persen, turun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 92,45 persen. Sama halnya dengan APK SMP, angka ini menunjukkan bahwa terdapat penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Soppeng yang tidak dapat menempuh Pendidikan SMA/Sederajat.

Apabila APK dibedakan menurut jenis kelamin, dapat diketahui dari Gambar 3 bahwa pada tahun 2021 secara umum APK laki-laki lebih tinggi dari APK perempuan pada jenjang SD dan SMP. Sementara itu pada jenjang SMA, APK perempuan lebih tinggi dari APK laki-laki dengan perbedaan yang cukup signifikan. Apabila dilihat dari polanya dari tahun 2020 ke tahun 2021, dapat diketahui bahwa pada jenjang Pendidikan SD, APK laki-laki mengalami penurunan sedangkan APK perempuan mengalami kenaikan. Sementara itu pada jenjang SMP, APK laki-laki mengalami kenaikan sedangkan APK perempuan mengalami penurunan. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA memiliki pola yang sama dengan jenjang pendidikan SD. Pada jenjang pendidikan SMA dapat diketahui bahwa APK laki-laki mengalami

penurunan yang signifikan sedangkan APK perempuan mengalami kenaikan yang signifikan. Secara garis besar hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah di jenjang SMA lebih tinggi dari penduduk laki-laki dari tahun 2020 ke tahun 2021.

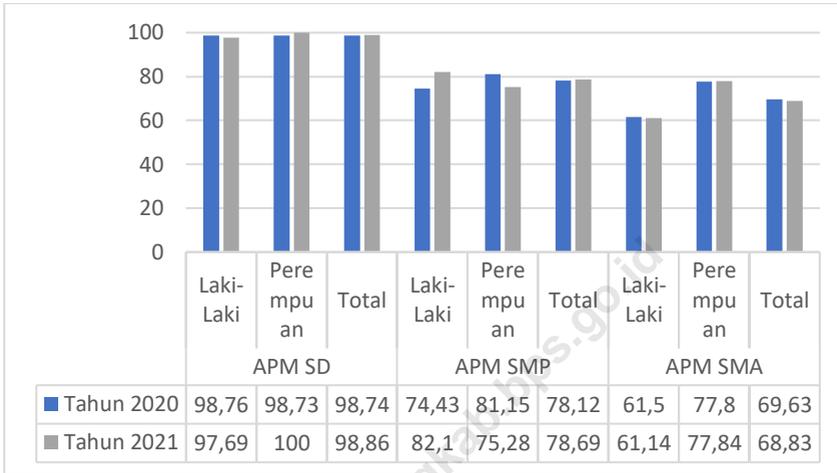
### 4.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain APS dan APK, masih ada lagi penghitungan Angka Partisipasi sekolah yang lain, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan terjemahan dari Net Enrolment Ratio (NER). APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Seperti halnya APS, APM juga bisa digunakan untuk melakukan kajian di ketiga jenis/jenjang pendidikan, yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk pengkajiannya di masing-masing jenjang pendidikan, digunakan formula sebagai berikut:

$$APM_{SD} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SD \text{ usia } 7-12}}{\text{Jumlah penduduk}_{7-12}} \times 100$$
$$APM_{SMP} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMP \text{ usia } 13-15}}{\text{Jumlah penduduk}_{13-15}} \times 100$$
$$APM_{SMA} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang bersekolah}_{SMA \text{ usia } 16-18}}{\text{Jumlah penduduk}_{16-18}} \times 100$$

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas Maret 2021 dan menggunakan formulasi di atas, hasilnya dapat disajikan pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Soppeng di jenjang Pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan APM pada jenjang Pendidikan SMA mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan yang terjadi pada APM SD dan SMP menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah SD dan SMP sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti sesuai dengan usianya meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021, sedangkan penurunan APM SMA menunjukan bahwa proporsi anak yang bersekolah SMA sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya diikuti sesuai dengan usianya menurun dari tahun 2020 ke tahun 2021. Manfaat dari APM adalah untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Apabila dibedakan berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui pada Gambar 4 bahwa pada jenjang pendidikan SD dan SMA, APM laki-laki mengalami penurunan

pada tahun 2020 ke tahun 2021, sedangkan APM perempuan mengalami kenaikan. Pola mulai berbalik pada jenjang pendidikan SMP, berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa APM laki-laki mengalami penurunan dan APM perempuan mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka perbedaan kenaikan dan penurunan APM tersebut semakin signifikan.

Secara umum di Kabupaten Soppeng dapat diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka APM semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan penduduk untuk bersekolah di suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan usianya semakin rendah. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Soppeng agar program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai dengan baik.

<https://soppengkab.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

**BAB 5**  
**CAPAIAN**  
**PENDIDIKAN**

<https://opn.kab.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB 5 CAPAIAN PENDIDIKAN

## 5.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf latin. Kalimat sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung subjek dan predikat, misalnya "saya membaca". Secara umum kemampuan membaca dan menulis dapat diformulasikan menjadi indikator Angka Buta Huruf (ABH) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Buta huruf adalah kondisi seseorang yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya seperti huruf jawa, kanji, dll. Kemampuan membaca yang dimaksud disini tidak dituntut harus bisa mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. ABH penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong buta huruf terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kegunaan angka tersebut adalah sebagai:

1. Alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang masih buta huruf;
2. Tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; dan
3. Alat untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

Manfaat angka ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduknya untuk memperoleh kemampuan menggunakan katakata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

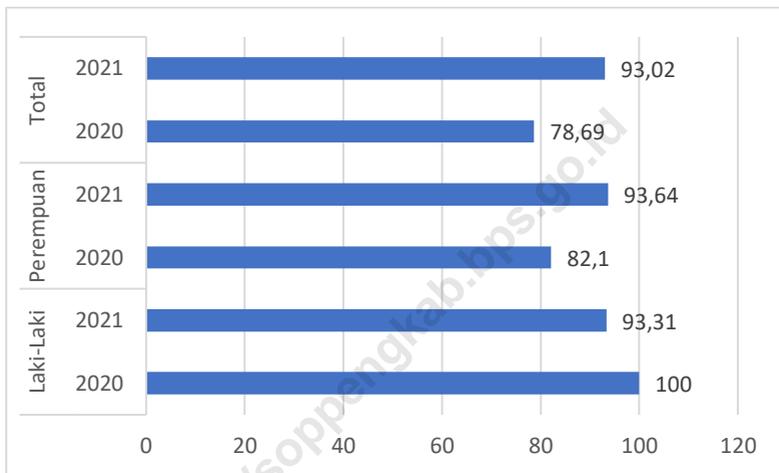
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015 lalu. Salah satu target dalam Tujuan 4, yakni Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Salah satu indikator dalam Tujuan 4 adalah 4.6.1.(a) persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas. Indikator tersebut merupakan indikator nasional sebagai tambahan indikator global. Sebagai bagian dari dunia global, Kabupaten Soppeng juga wajib mencapai target tersebut. Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari tingkat Pendidikan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis.

Dalam Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial disebutkan bahwa AMH merefleksikan outcome pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem Pendidikan dasar. Indikator tersebut kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. AMH dan ABH merupakan indikator yang nilainya saling berbanding terbalik. Semakin tinggi AMH suatu wilayah berarti ABH akan semakin rendah.

Dengan melakukan pengolahan data dari hasil pendataan Susenas Maret 2021 hasilnya dapat disajikan pada Gambar 5 berikut.

*Gambar 5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

Pada 2021 tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten soppeng yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 93,02 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Soppeng masih mempunyai kewajiban untuk menuntaskan buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 6,98 persen. Oleh karena itu budaya literasi masih harus ditingkatkan karena merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

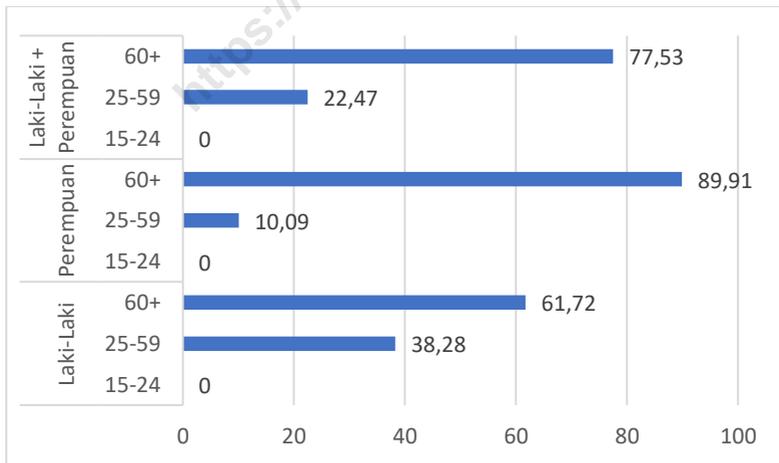
Sementara itu apabila kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas dibandingkan antara tahun 2020 dan 2021, dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf penduduk mengalami kenaikan. Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis penduduk, antara lain melalui program kejar paket A, paket B, paket C, dan program

keaksaraan fungsional. Melalui program ini diharapkan penduduk yang tidak pernah sekolah mampu membaca dan menulis huruf latin, termasuk juga mampu berbahasa Indonesia. Harapannya, mereka mempunyai kesempatan untuk memperoleh tambahan pengetahuan melalui media cetak dan elektronik.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa AMH laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 100 persen menjadi 93,31 persen, sedangkan AMH perempuan mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 82,10 persen menjadi 93,64 persen. Secara umum AMH laki-laki dan perempuan pada tahun 2021 sudah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, apabila dibandingkan secara langsung dapat diketahui bahwa AMH laki-laki masih lebih rendah dari AMH perempuan.

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, angka buta huruf dapat disajikan dalam Gambar 6.

*Gambar 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Soppeng 2021*



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Pada Gambar 6 dapat diketahui bahwa ABH tertinggi berada pada kelompok umur 60 tahun ke atas baik pada penduduk laki-laki, perempuan maupun secara total. Sedangkan pada kelompok umur 15-24 tahun, ABH sudah mencapai 0 persen baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa ABH pada penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ABH pada penduduk laki-laki terutama pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

<https://soppengkab.bps.go.id>

**BAB 6**

**SARANA DAN  
PRASARANA  
PENDIDIKAN**

<https://screentop.com.go.id>

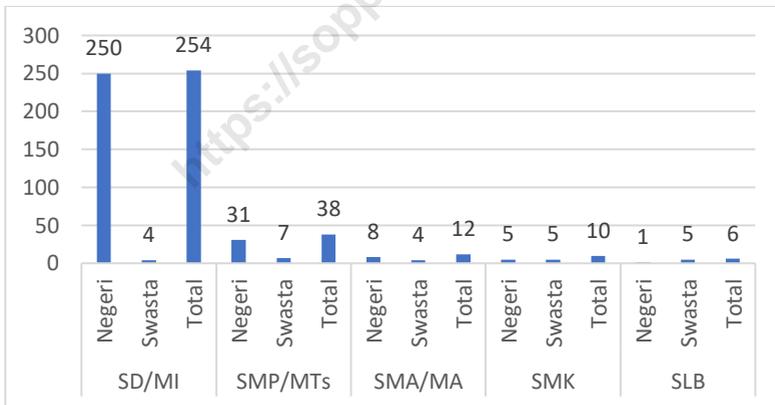
<https://soppengkab.bps.go.id>

# BAB 6 SARANA DAN PRASARANA

## 6.1 Jumlah Sekolah

Fasilitas pendidikan baik berupa gedung maupun pendidikannya merupakan faktor yang paling utama untuk memajukan pendidikan. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran dimana menurut tingkatannya, ada sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.

Gambar 7 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Kabupaten Soppeng Tahun 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Gambar 7 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Soppeng adalah sejumlah 254 sekolah, jenjang pendidikan SMP/MTs sejumlah 38 sekolah, jenjang pendidikan SMA/MA sejumlah

12 sekolah, jenjang pendidikan SMK sejumlah 10 sekolah dan jenjang pendidikan SLB sejumlah 6 sekolah.

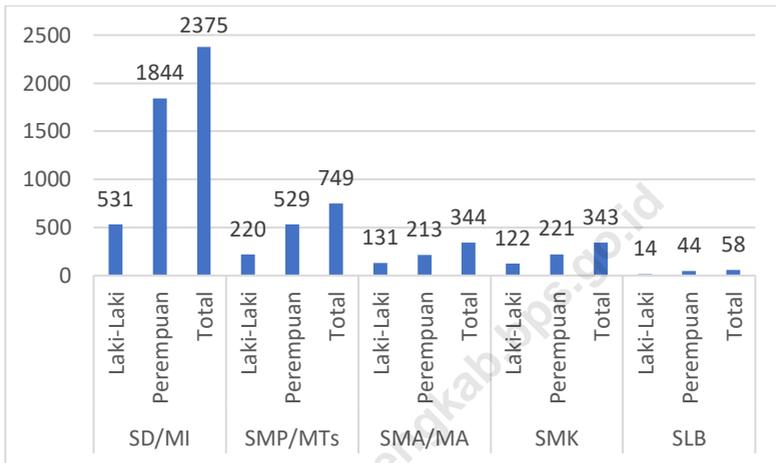
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia tidak hanya sebatas pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara umum apabila sekolah dibedakan berdasarkan penyelenggaranya, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Soppeng masih didominasi oleh sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dari semua jenjang pendidikan, perbedaan jumlah sekolah negeri dan swasta yang paling mencolok ada di jenjang pendidikan SD/MI yaitu 250 sekolah negeri berbanding 4 sekolah swasta, diikuti oleh jenjang pendidikan SMP/MTs dengan 31 sekolah negeri dan 7 sekolah swasta, jenjang pendidikan SMA/MA dengan 8 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta dan jenjang pendidikan SLB dengan 1 SLB negeri dan 5 SLB swasta. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMK, jumlahnya sama antara negeri dan swasta yaitu masing-masing 5 sekolah.

## 6.2 Jumlah Guru

Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian umum, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan data kementerian pendidikan dan kebudayaan, dapat disajikan jumlah guru yang ada di Kabupaten Soppeng pada Gambar 9 berikut.

Gambar 8 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebagian besar guru yang ada di Kabupaten Soppeng merupakan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dengan jumlah sebanyak 2.375 orang. Pada jenjang pendidikan lainnya tercatat guru SMP/MTs sebanyak 749 orang, guru SMA/MA sebanyak 344 orang, guru SMK sebanyak 343 orang dan paling sedikit adalah guru SLB sebanyak 58 orang.

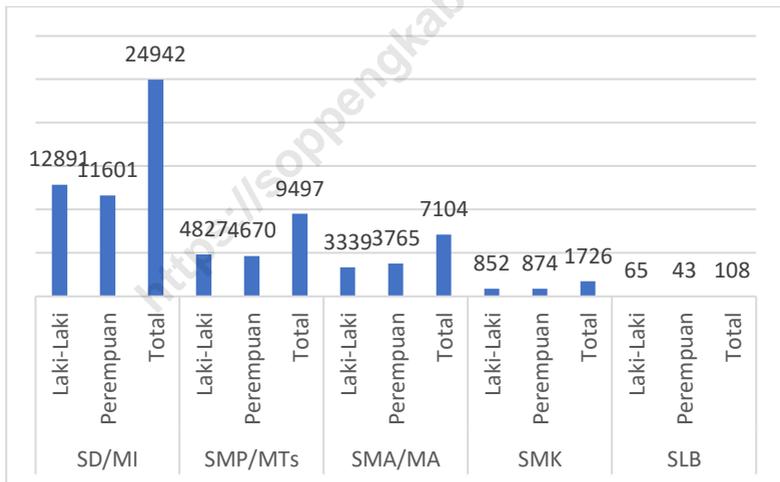
Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui bahwa secara umum jumlah guru perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru laki-laki baik di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, maupun SLB. Perbedaan yang paling signifikan ada pada jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2021 tercatat terdapat 1.844 guru perempuan sedangkan guru laki-laki hanya 531 orang.

### 6.3 Jumlah Murid

Murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Pada umumnya murid merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat da SMA/Sederajat.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah murid di Kabupaten Soppeng dapat disajikan dalam Gambar 10 berikut.

*Gambar 9 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2021*



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar murid di Kabupaten Soppeng merupakan murid yang sedang bersekolah di jenjang SD/MI, jumlahnya mencapai 24.942 murid pada tahun 2021. Semakin bertambah tinggi jenjang pendidikan, jumlah murid yang bersekolah semakin menurun. Pada jenjang SMP/MTs, pada tahun 2021 tercatat hanya 9.497 murid yang bersekolah, pada

jenjang SMA/MA hanya 7.104 murid yang bersekolah dan pada jenjang SMK hanya 1.726 murid yang bersekolah. Sementara pada SLB, tercatat hanya terdapat 108 murid yang bersekolah pada tahun 2021.

Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, diketahui bahwa pada tahun 2021 di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, murid laki-laki jumlahnya lebih banyak daripada murid perempuan. Namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dapat diketahui bahwa jumlah murid perempuan lebih banyak daripada murid laki-laki.

Hal ini dapat menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah terutama dalam usaha mensukseskan program wajib belajar 12 tahun sehingga setiap penduduk usia sekolah mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

# **BAB 7**

# **PENUTUP**

<https://soppentab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

## 7.1 Kesimpulan

Dari hasil kajian data Susenas Maret 2020 dan 2021 sebelumnya dan hasil analisis dengan menggunakan beberapa indikator pendidikan yang ada, dapat disimpulkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan evaluasi pembangunan di bidang pendidikan, khususnya di Kabupaten Soppeng.

1. Partisipasi prasekolah (0-6 tahun) pada tahun 2021 di Kabupaten Soppeng baru mencapai 28,86 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka hal ini perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Soppeng.
2. Dari hasil perhitungan angka partisipasi sekolah, baik APS, APM maupun APK di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) di Kabupaten Soppeng, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Semakin rendahnya angka partisipasi tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya partisipasi sekolah baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
3. Hingga tahun 2021 masih terdapat 6,98 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf/ tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana di Kabupaten Soppeng. Bila dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, sebagian besar penduduk yang buta huruf tersebut berada pada kelompok umur 60 tahun ke atas.
4. Jumlah guru di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2021 didominasi oleh guru yang mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI, jumlah ini sebanding dengan jumlah sekolah yang juga merupakan terbanyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lainnya.
5. Pada Tahun 2021 di Kabupaten Soppeng, sebagian besar murid yang ada di Kabupaten Soppeng adalah murid yang sedang mengenyam bangku

pendidikan di jenjang SD/MI. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, jumlah murid yang sedang mengenyam bangku pendidikan semakin menurun.

<https://soppengkab.bps.go.id>

## 7.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah diberikan, dapat diusulkan beberapa saran bagi pemerintah kabupaten Soppeng sebagai berikut.

1. Mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya pendidikan usia dini atau pendidikan pra sekolah bagi anak-anaknya. Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting, karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil atau pada usia 0-5 tahun sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar
2. Mendorong masyarakat untuk menuntaskan pendidikan minimal 12 tahun hingga jenjang pendidikan SMA/Sederajat tidak hanya berhenti pada jenjang pendidikan SD/MI saja.
3. Mengentaskan buta huruf secara paripurna disetiap kelompok usia.
4. Membuka opsi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, tidak mampu menuntaskan sekolah dan tidak mampu bersekolah agar memiliki kemampuan lebih untuk bersaing di dunia kerja.
5. Memperbanyak fasilitas sekolah khususnya untuk jenjang pendidikan SMA/Sederajat sehingga akses pendidikan lebih merata hingga wilayah pelosok yang saat ini akses pendidikannya masih sulit untuk dijangkau.
6. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

<https://soppengkab.bps.go.id>

# TABEL-TABEL

<https://soppon.kab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

# TABEL-TABEL

*Tabel 1 Persentase Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Masih/Pernah Mengikuti Pendidikan Prasekolah, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	34,51	20,42	28,32
2021	28,60	29,15	28,86

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

*Tabel 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2021*

Jenis Kelamin dan APS		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
APS 7-12 Tahun	Laki-Laki	100	97,69
	Perempuan	98,73	100
	Total	99,35	98,86
APS 13-15 Tahun	Laki-Laki	91,6	96,48
	Perempuan	97,84	94,37
	Total	95,03	95,43
APS 16-18 Tahun	Laki-Laki	70,28	72,71
	Perempuan	86,2	84,67
	Total	78,22	78,22

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

*Tabel 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*

Jenis Kelamin dan APK		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
APK SD	Laki-Laki	107,27	103,64
	Perempuan	105,8	107,65
	Total	106,52	105,68
APK SMP	Laki-Laki	86,21	102,42
	Perempuan	84,42	75,39
	Total	85,22	88,91
APK SMA	Laki-Laki	86,82	78,49
	Perempuan	98,1	104,96
	Total	92,45	90,68

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

*Tabel 4 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*

Jenis Kelamin dan APM		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
APM SD	Laki-Laki	98,76	97,69
	Perempuan	98,73	100
	Total	98,74	98,86
APM SMP	Laki-Laki	74,43	82,1
	Perempuan	81,15	75,28
	Total	78,12	78,69
APM SMA	Laki-Laki	61,5	61,14
	Perempuan	77,8	77,84
	Total	69,63	68,83

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

*Tabel 5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*

Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
Angka Melek Huruf (AMH)	Laki-Laki	100	93,31
	Perempuan	82,10	93,64
	Total	78,69	93,02

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2020-2021

*Tabel 6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Kabupaten Soppeng 2020 dan 2021*

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur		Tahun
		2021
(1)		(2)
Laki-Laki	15-24	0
	25-59	38,28
	60+	61,72
Perempuan	15-24	0
	25-59	10,09
	60+	89,91
Total	15-24	0
	25-59	22,47
	60+	77,53

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret Tahun 2021

Tabel 7 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
SD/MI	Negeri	250	250
	Swasta	3	4
	Total	253	254
SMP/MTs	Negeri	31	31
	Swasta	7	7
	Total	38	38
SMA/MA	Negeri	8	8
	Swasta	4	4
	Total	12	12
SMK	Negeri	5	5
	Swasta	5	5
	Total	10	10
SLB	Negeri	1	1
	Swasta	4	5
	Total	5	6

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020-2021

Tabel 8 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
SD/MI	Laki-Laki	542	531
	Perempuan	1797	1844
	Total	2339	2375
SMP/MTs	Laki-Laki	247	220
	Perempuan	510	529
	Total	757	749
SMA/MA	Laki-Laki	150	131
	Perempuan	223	213
	Total	373	344
SMK	Laki-Laki	123	122
	Perempuan	203	221
	Total	326	343
SLB	Laki-Laki	16	14
	Perempuan	41	44
	Total	57	58

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020-2021

Tabel 9 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan 2021

Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin		Tahun	
		2020	2021
(1)		(2)	(3)
SD/MI	Laki-Laki	10505	12891
	Perempuan	9739	11601
	Total	20244	24942
SMP/MTs	Laki-Laki	3415	4827
	Perempuan	3614	4670
	Total	7029	9497
SMA/MA	Laki-Laki	1886	3339
	Perempuan	2818	3765
	Total	4704	7104
SMK	Laki-Laki	2232	852
	Perempuan	1433	874
	Total	3665	1726
SLB	Laki-Laki	114	65
	Perempuan	91	43
	Total	205	108

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020-2021

# DATA

## MENCERDASKAN

### BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN SOPPENG**

---

Jl. Salotungo No. 127, 90812. Watansoppeng,  
Sulawesi Selatan. Telp (0484) 21060,  
Faks (0484) 23377, Mailbox soppengkab@bps.go.id